

Diplomasi Ekonomi Indonesia

Pada pernyataan pers pertamanya pada 2015, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menguraikan pandangan soal langkah dan tantangan kebijakan luar negeri dan diplomasi RI untuk lima tahun ke depan. Berpedoman pada arahan Presiden bahwa kebijakan luar negeri harus berorientasi kepada rakyat (*diplomacy for the people*) dan membunih (*down-to-earth*), Kementerian Luar Negeri menekankan pentingnya diplomasi yang terkoneksi secara konkret dengan kepentingan rakyat.

Oleh

Leonard F. Hutabarat, Ph.D.

Residen Jokowi telah menempatkan rakyat pada pusat agenda pembangunan yang *people-centered policy*, termasuk diplomasi dan kebijakan luar negeri. Dengan visi itu Menlu Retno Marsudi telah memprioritaskan diplomasi guna mendukung pencapaian hasil nyata bagi pemangku kepentingan dalam negeri, termasuk bagi petani, nelayan maupun perajin UMKM. Hal ini jelas terlihat dari prioritas diplomasi ekonomi, bahkan Kemenlu juga telah membentuk Satgas Penguatan Diplomasi Ekonomi awal tahun 2015 ini. Dalam konteks bilateral, promosi perdagangan, pariwisata dan investasi juga akan lebih mewarnai aktivitas perwakilan Indonesia di luar negeri.

Sine Qua Non Globalisasi Ekonomi

Indonesia saat ini dihadapkan pada kondisi global yang menimbulkan tantangan baru yang makin kompleks. Pembangunan, krisis keuangan global, krisis pangan dan energi merupakan isu internasional yang menjadi tantangan bagi seluruh negara, baik yang maju maupun yang berkembang. Kondisi ini

sering megecoh, sehingga setiap perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri seringkali dihadapkan pada ketidakpastian.

Meskipun dunia diplomasi bergerak dengan cepat sehingga sulit untuk diprediksi dan memiliki aneka nuansa dan semakin kompleks, tantangan bagi diplomasi Indonesia adalah bagaimana mengadopsi kondisi politik luar negeri kita yang bebas dan aktif ke dalam realitas baru abad ke-21 ini. Sistem internasional saat ini tidak lagi terstruktur dan hubungan antarnegara telah mengalami perubahan.

Indonesia sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi ke-16 tertinggi di dunia dan ke-3 di Asia, merupakan *middle power* dengan nilai-nilai universal yang dianutnya serta perannya dalam kepentingan global dan regional. Globalisasi ekonomi mau tidak mau makin melibatkan Indonesia dengan diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi bukan merupakan sebuah alternatif pilihan, namun merupakan sebuah keniscayaan mengingat globalisasi ekonomi akan terus melanda dunia, khususnya Indonesia.

Reorientasi Diplomasi Ekonomi

Di tengah kepercayaan terhadap perekonomian nasional, meskipun kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini kuat, tetap memiliki risiko yang tinggi terhadap gejolak keuangan global. Sesuai dengan proyeksi Bank Dunia (2015), perekonomian Indonesia memang tumbuh mantap pada angka 5%, namun jika dinilai dari gejolak aliran modal menunjukkan bahwa ekonomi negeri ini tidak kebal dari berbagai krisis, seperti krisis zona Eropa yang tengah terjadi saat ini, termasuk risiko kerentanan pemulihan ekonomi global.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini akan mencapai 3,0%. Namun, kenyataan bahwa sebagian besar penduduk dunia juga belum merasakan kemajuan ekonomi.

Oleh karena itu, peranan diplomasi ekonomi menjadi sangat strategis dalam turut menunjang perekonomian nasional yang tengah berkembang, untuk dapat mengakomodir perkembangan ekonomi global yang tengah berada dalam ketidakpastian. Presiden Jokowi pada saat Rapat Kerja Pimpinan Kemenlu dan Kepala Perwakilan RI awal tahun 2015, menegaskan kembali mesin diplomasi ekonomi diupayakan untuk mendukung pencapaian target ekonomi di dalam negeri. Diplomasi ekonomi harus mengeksplorasi pasar baru dan peluang bisnis bagi produk Indonesia dan investasi yang sejalan dengan pergeseran *world's economic center of gravity*.

Dari sejumlah capaian yang telah diraih politik luar negeri, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu penanganan lebih serius, antara lain: peranan masyarakat di pusat dan di daerah serta

media massa sebagai bagian dari upaya implementasi diplomasi ekonomi, dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

Diplomasi ekonomi memainkan peran signifikan. Pertama, memperkuat kepentingan, perpanjangan politik domestik dan mendukung pembangunan ekonomi dalam negeri. Kedua, memperkuat pengaruh internasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memperkuat upaya diplomasi yang ada. Ketiga, meningkatkan lingkungan diplomatik yang mendukung situasi kerja sama dan perdamaian. Dan akhirnya, keempat, mencapai peluang ekonomi.

Untuk mengoptimalkan diplomasi ekonomi, Indonesia perlu menentukan strategi secara nasional, regional dan internasional. Kebijakan pemerintah perlu melakukan reorientasi secara geoekonomi dan sektoral. Diplomasi ekonomi Indonesia dalam jangka menengah dan panjang perlu lebih serius menggarap *untapped* atau *prospective market* dan bukan hanya bertumpu pada pasar tradisional. Indonesia juga perlu menetapkan sektor prioritas yang akan dikembangkan sehingga benar-benar mendukung ekonomi kerakyatan. Sebagai negara maritim dan kepulauan, sektor perikanan dan kelautan sepatutnya juga menjadi prioritas sektoral. Sebagai negara agraris, sektor pertanian dan pangan selayaknya pula menjadi perhatian penting dalam diplomasi ekonomi, selain sektor UMKM, ekonomi kreatif dan budaya yang menjadi salah satu ujung tombak kekuatan ekonomi nasional.

Penulis, pemerhati masalah internasional, alumnus Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Paris